

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia, membuat keadaan bangsa ini jadi memprihatinkan. Mereka yang memimpin bangsa seharusnya menjadi panutan dan contoh yang baik bagi anak – anak bangsa, agar dapat melanjutkan kepemimpinan dengan adil sejahtera dengan tidak melakukan korupsi.

Korupsi adalah hal yang sangat tidak dianjurkan oleh siapapun, tapi pada kenyataannya banyak orang yang melakukan tindak korupsi. Menurut hukum di Indonesia Penjelasan korupsi ada dalam tiga belas pasal UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Menurut UU itu, ada tigapuluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut terdapat pada pasal – pasal berikut :

1. Pasal 2;
2. Pasal 3;
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a;
4. Pasal 5 ayat huruf b;
5. Pasal 5 ayat (2);
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
8. Pasal 6 ayat (2);
9. Pasal 7 ayat (1) huruf (a)
10. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
13. Pasal 7 ayat (2)
14. Pasal 8;
15. Pasal 9;

16. Pasal 10 huruf a;
17. Pasal 10 huruf b;
18. Pasal 10 huruf c;
19. Pasal 11;
20. Pasal 12 huruf a;
21. Pasal 12 huruf b;
22. Pasal 12 huruf c;
23. Pasal 12 huruf d;
24. Pasal 12 huruf e;
25. Pasal 12 huruf f;
26. Pasal 12 huruf g;
27. Pasal 12 huruf h;
28. Pasal 12 huruf i;
29. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan
30. Pasal 13.

Menurut Tim KPK korupsi mempunyai dampak yang negatif. Pertama, Penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi tidak sesuai dengan prosedur, sebagai contoh dalam hal lalu lintas. Untuk mengurus SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan kasus tilang kendaraan, banyak dari masyarakat dan aparat kepolisian yang menggunakan kekuasaan (Tim KPK; 2013:5). Hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya aturan yang telah dibuat. Yang kedua, Pembangunan fisik menjadi terbengkalai. Banyak jalan umum, fasilitas umum seperti sekolah banyak yang rusak tetapi tidak ada renovasi. Yang ketiga, Prestasi jadi tidak berarti. Seharusnya orang yang menduduki jabatan tertentu karena dia memang berprestasi dan berkompeten. Tetapi pada kenyataannya sekarang yang menduduki jabatan adalah orang yang mempunyai banyak uang atau kekuasaan. Yang Ke empat, Demokrasi tidak berjalan dengan baik. Ketika pemilihan wakil daerah terjadi, tidak seperti yang diharapkan masyarakat, bahwa yang dapat menduduki jabatan adalah yang menang dalam pesta demokrasi, melainkan mereka yang mempunyai uang banyak yang dapat menduduki jabatan yang diinginkan. Kemudian yang kelima adalah Ekonomi menjadi hancur. Perusahaan

yang berdiri kebanyakan adalah perusahaan yang bermodal besar yang dapat menyuap untuk mendirikan usaha, dan masyarakat yang mempunyai penghasilan kecil dan ingin berusaha dibuat susah oleh pemerintah.

Menurut survei terbaru lembaga pemantau korupsi *Transparency International*, lebih dari seperempat orang di seluruh dunia membayar suap ketika berhadapan dengan pelayanan publik dalam dua belas bulan terakhir. Barometer korupsi global 2013 *Transparency International* melakukan survei tersebut dengan didasarkan pada wawancara pada 114.270 orang di 107 negara. Lembaga itu menggunakan survei opini publik untuk memperkirakan prevalensi korupsi di lembaga-lembaga nasional di seluruh dunia. Laporan itu menyimpulkan, sebagaimana dilaporkan Huffington Post, Rabu (10/7/2013), meskipun suap merupakan masalah global, praktik itu tidak merata di seluruh dunia. Meski banyak negara yang warganya melakukan korupsi, namun masih ada beberapa negara yang tingkat suap atau korupsinya masih rendah seperti Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Jepang, dan Australia.”

Menurut survei terbaru lembaga pemantau korupsi *Transparency International*, lebih dari seperempat orang di seluruh dunia membayar suap ketika berhadapan dengan pelayanan publik dalam dua belas bulan terakhir.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *transparency.org*, sebuah badan independen dari 146 negara, tercatat data 10 besar negara yang dinyatakan sebagai negara terkorup.

Daftar sepuluh negara terkorup di dunia itu adalah :

1. Azerbaijan
2. Bangladesh
3. Bolivia
4. Kamerun
5. Indonesia
6. Irak
7. Kenya
8. Nigeria

9. Pakistan

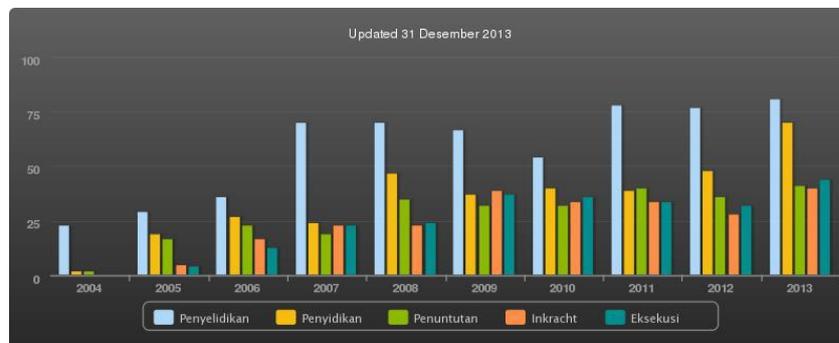
10. Rusia.

Berdasarkan daftar di atas, negara Indonesia berada di peringkat ke lima negara terkorup di dunia. Tingkat asia pasifik, Indonesia adalah yang terkorup. Berikut adalah lima besar negara paling korup di Asia-Pasifik :

1. Indonesia
2. Kamboja
3. Vietnam
4. Filipina
5. India

Dalam negara Indonesia telah ada lembaga yang menangani kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK. KPK telah banyak menangani kasus korupsi di Indonesia. Berikut merupakan data statistik tindak pidana korupsi yang disusun oleh KPK :

Gambar 1.1
Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi



Sumber : <http://acch.kpk.go.id>

Penyidikan 70 Kasus. Per 31 Desember 2013, di tahun 2013 KPK melakukan penyelidikan 81 perkara, penyidikan 70 perkara, penuntutan 41 perkara, inkracht 40 perkara, dan eksekusi 44 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2013 adalah penyelidikan 585 perkara, penyidikan 353 perkara, penuntutan 277 perkara, inkracht 243 perkara, dan eksekusi 247 perkara.

Tabel 1.1

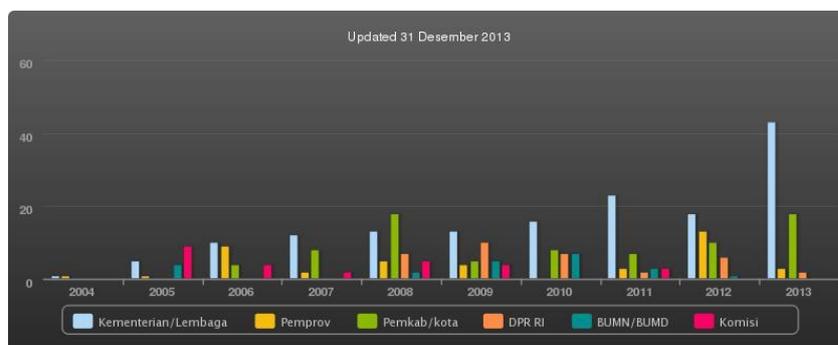
Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2013 (per 31 Desember 2013)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	585
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	353
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	277
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	243
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	247

Sumber : <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun> diakses pada tanggal 4 februari 2014

Gambar 1.2

Penanganan TPK Berdasarkan Jenis Perkara



Sumber : <http://acch.kpk.go.id>

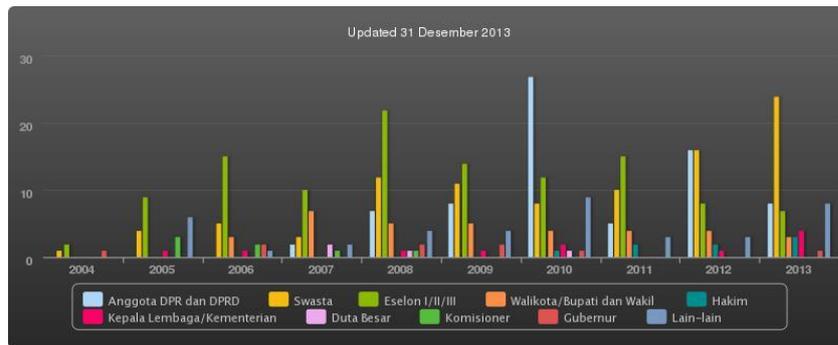
Kasus Penyuaan 50 Kasus. Per 31 Desember 2013, di tahun 2013 KPK melakukan penanganan korupsi yang didominasi dari jenis perkara penyuaan yaitu sebesar 50 kasus, disusul korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 9 kasus, TPPU sebanyak 7 kasus, dan korupsi perijinan sebanyak 3 kasus.

Tabel 1.2
Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara
Tahun 2004-2013 (per 31 Desember 2013)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	113
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	13
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	164
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	12
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	38
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	49	70	354

Sumber : <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara> diakses pada tanggal 4 februari 2014

Gambar 1.3
Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan



Sumber : <http://acch.kpk.go.id>

Pelaku Korupsi Didominasi dari Swasta per 31 Desember 2013, di tahun 2013 KPK menangkap tersangka korupsi dari unsur pengusaha/swasta sebanyak 24 orang, disusul anggota DPR/DPRD sebanyak 8 orang, eselon I/II/III sebanyak 7 orang, Kepala Lembaga/Kementerian 4 orang, dan Hakim 3 orang.

Tabel 1.3

Tabulasi Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Tingkat jabatan per 31 Desember 2013

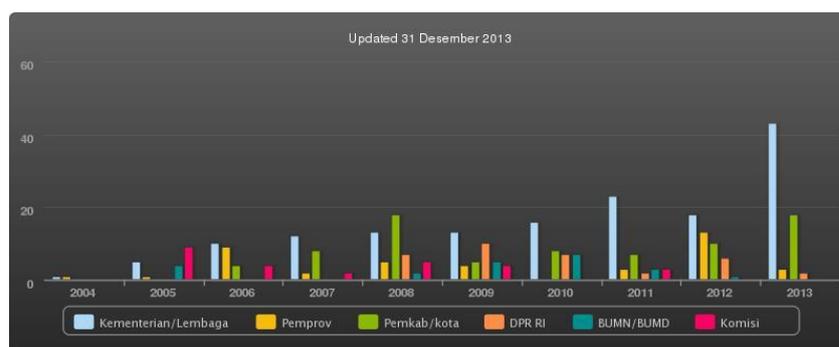
Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	73
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	11
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	10
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	35
Eselon I, II dan III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	114

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	94
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	40
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	396

Sumber : <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan> diakses pada tanggal 4 Februari 2014

Gambar 1.4

Penanganan TPK Berdasarkan Instansi



Sumber : <http://acch.kpk.go.id>

Kementerian/Lembaga Lebih Banyak Korupsinya per 31 Desember 2013, di tahun 2013 penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di lingkungan instansi Kementerian/Lembaga Pusat sebanyak 43 perkara, disusul dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 18 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 3 perkara dan dari DPR sebanyak 2 perkara.

Tabel 1.4

Tabulasi Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
DPR RI	0	0	0	0	7	10	7	2	6	2	34
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	43	154
BUMN/BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3	1	0	22
Komisi	0	9	4	2	2	0	2	1	0	0	20
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	0	3	13	3	41
Pemkab/Pemkot	0	0	4	8	18	5	8	7	10	18	78
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	66	349

Sumber : <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi> diakses pada tanggal 4 februari 2014

Gambar 1.5

Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)



Sumber : <http://acch.kpk.go.id>

Total ada 237 Perkara yang Inkracht. Per 31 Desember 2013, di tahun 2013 perkara korupsi yang telah diputus berkekuatan hukum tetap berjumlah: 10 perkara di tingkat Pengadilan Negeri, 10 perkara di tingkat Pengadilan Tinggi, dan 20 perkara di tingkat Mahkamah Agung.

Tabel 1.5

Tabulasi Data Perkara Korupsi Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2004-2013 (per 31 Desember 2013)

Inkracht	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Pengadilan Negeri	3	5	9	9	20	20	21	8	10	105
Pengadilan Tinggi	0	3	0	0	2	3	0	3	10	21
Mahkamah Agung	2	9	14	14	17	11	13	17	20	117
Jumlah	5	17	23	23	39	34	34	28	40	243

Sumber : <http://acch.kpk.go.id/statistik-perkara-berkekuatan-hukum-tetap>
diakses pada tanggal 4 Februari 2014

Berdasarkan prosiding seminar nasional mengenai Korupsi, pencegahan dan pemberantasannya, dalam rangka hari anti korupsi se Dunia yang diselenggarakan di Jakarta, 8 Desember 2005, korupsi mempunyai dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia, yaitu:

1. Merendahkan martabat bangsa di forum Internasional.
2. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*.
3. Bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta (*private sector*).
4. Bersifat transnasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization / commercial corruptions*), dan bukan lagi masalah negara per negara.
5. Cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.
6. Merusak moral bangsa (*moral and value damage*).
7. Mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi).
8. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara.

9. Mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
10. Menodai supremasi hukum (*jepardizing the rule of law*).
11. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti *money laundering*.
12. Bersifat terorganisasi (*organized crime*) yang cenderung transnasional.
13. Melanggar HAM, (sosial dan ekonomi) karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil, sebab terjadi di sektor-sektor pelayanan publik penting seperti kesehatan, pendidikan, pangan perusahaan lingkungan hidup, penyebaran narkoba, keamanan bangunan yang tidak memenuhi standart teknis dan sebagainya, menimbulkan diskriminasi, mengganggu access to justice, mencederai equality before the law, right to education dan sebagainya, (if human rights are violated by corruptions, respect for human rights can be a powerful tool in fighting corruption, Laurence Cockcroft, 1998)
14. Dilakukan dalam setiap kesempatan, termasuk saat negara dalam keadaan krisis, misal pemakaian valas oleh pejabat tertentu dalam situasi rupiah tertekan dan bencana alam.

Banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh korupsi membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana pencegahan korupsi sejak dini. Dalam hal ini peneliti akan melakukan eksperimen dengan menggunakan dongeng sebagai salah satu cara mencegah korupsi. Karena menurut ketua komnas perlindungan anak Seto Mulyadi “Dongeng, tak hanya sebagai pengantar tidur, tetapi juga bermanfaat untuk mengubah perilaku anak. Dongeng menyimpan kekuatan dalam kata-kata yang digunakannya. Daripada menggunakan kekerasan fisik seperti mencubit atau menjewer, dongeng jauh lebih efektif untuk mengubah perilaku anak”. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan dongeng.

Sampai saat ini KPK telah mengeluarkan banyak buku dongeng yaitu Buku Tunas Integritas dan Peternakan Kakaek tulus. Dongeng dapat mempengaruhi perilaku anak. Dengan membaca atau dibacakan dongeng anak akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Menurut Yudha Andi dalam bukunya cara pintar mendongeng, dongeng dapat menjadi pemicu daya kritis dan *curiosity* anak. Hal ini akan menjadi *feedback* dari pembacaan dongeng, jika pesan/makna yang terkandung dalam dongeng pendidikan anti korupsi dibacakan (Yudha,2009:56).

Dongeng dapat melatih berpikir sistematis. Dalam dongeng terkandung alur, tokoh, dan latar. Ketika mendengarkan dongeng, anak secara tidak langsung membayangkan kisah yang diceritakan tersebut (Yudha,2009:56).

Dongeng merupakan komunikasi yang menarik perhatian anak-anak. Dongeng merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif, afektif, konatif, dan juga Imajinasi. Kognitif (pengetahuan), anak-anak dapat mengetahui bahwa korupsi itu tidak baik. Afektif (perasaan), anak-anak dapat mengembangkan perasaan bersalah ketika si anak melakukannya. Konatif (penghayatan), anak-anak melakukan penghayatan melalui cerita dongeng. Imajinasi, dengan adanya pembacaan dongeng dapat melatih imajinasi cerita, hal ini dilakukan untuk mencegah anak-anak melakukan korupsi.

Dongeng pendidikan anti korupsi ini akan dibacakan sebanyak lima kali. Karena menurut Tony Buzan dalam bukunya mind map untuk anak, lima kali pengulangan setara dengan ingatan jangka panjang. Setelah pengulangan kelima, imajinasi akan berjalan dan kita akan berkhayal dengan memikirkan informasi yang kita dapat.

Informasi yang didapat oleh responden diharapkan akan mengubah perilaku anak dalam hal kesidlipinan sesuai dengan dongeng yang dibacakan. Perilaku anak yang semula cenderung tidak disiplin, seperti ramai sendiri, keluar ruangan tanpa ijin diharapkan akan berubah ketika anak telah dibacakan dongeng sebanyak lima kali.

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih Objek penelitian siswa kelas tiga SD Negeri Banjarsari 1 kota Bandung karena, siswa kelas tiga SD Negeri Banjarsari 1 rata-rata berusia delapan hingga sembilan tahun. Dimana anak umur delapan hingga sembilan tahun ingatannya kuat. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Bandung di beberapa daerah di Bandung, SD Negeri Banjarsari 1 kota Bandung merupakan SD favorit dan memiliki siswa-siswa yang berpotensi dan berprestasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas rumusan masalah yang dikemukakan diantaranya :

Apakah pembacaan dongeng pendidikan anti korupsi dapat mempengaruhi perilaku anak dalam hal korupsi?

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana teknik pembacaan dongeng bisa mempengaruhi perilaku anak dalam hal korupsi?
2. Faktor-faktor apa sajakah dalam dongeng yang mempengaruhi perilaku anak.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai maksud dan tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana teknik pembacaan dongeng yang dapat mempengaruhi perilaku anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak setelah pembacaan dongeng.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang komunikasi yang berkaitan dengan perilaku anak dan tindak korupsi.

1.4.2 Aspek praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu bukti bahwa peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu berupa teori yang telah dipelajari selama penulis menempuh perkuliahan dalam menempuh dunia kerja dan penelitian ini juga bermanfaat untuk menggali masalah yang ada di lapangan mengenai hal hal yang berkaitan dengan perilaku anak.

1.4.2.2 Bagi Telkom Economics & Business School

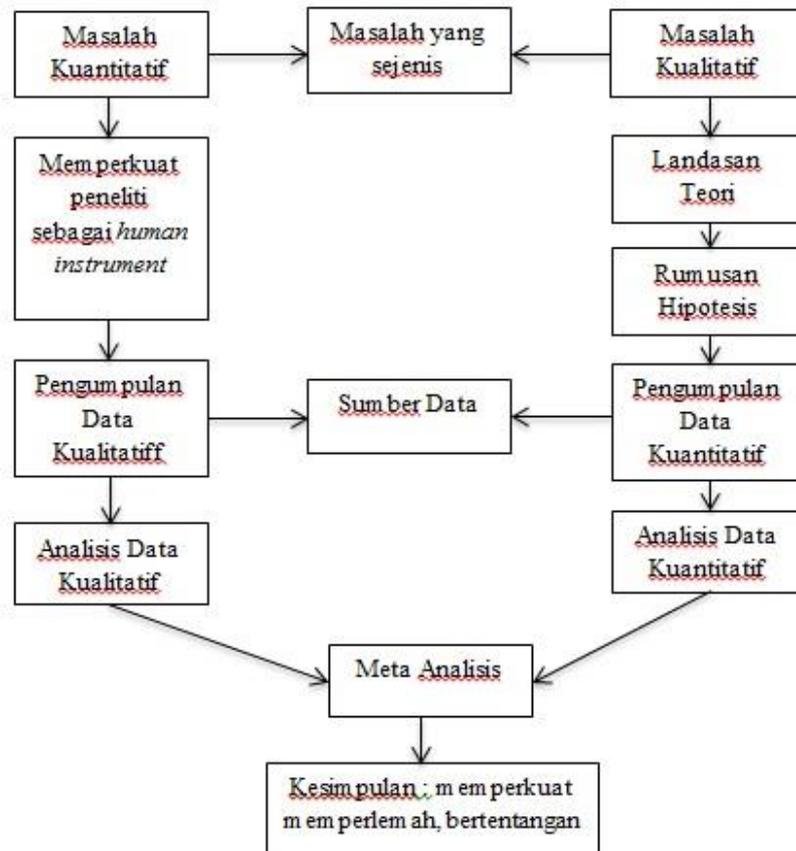
Penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan Telkom Economics & Business School serta memberikan referensi bagi mahasiswa dan kalangan akademisi yang ingin mempelajari masalah yang berhubungan perilaku anak.

1.5 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.6

Tahapan Penelitian Metode Kombinasi model *Concurrent Triangulation*



1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada siswa kelas tiga SD Negeri Banjarsari yang beralamatkan di Jalan Merdeka no 22 Bandung, kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan sumur Bandung, Provinsi Jawa Barat.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April hingga Mei tahun 2014.